



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
AROSUKA

**RENJA
INSTANSI PEMERINTAH**



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah yang Maha Esa atas Limpahan dan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2025.

Renja ini kami susun sebagai ujud Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan didasarkan pada Indikator Kinerja SKPD yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja ini masih terdapat kekurangan untuk itu kami memerlukan Kritikan dan saran guna penyempurnaan Renja ini, namun demikian kami berharap semoga Renja ini bermamfaat sebagai bahan evaluasi dan penentuann kebijakan lebih lanjut.

Arosuka, Januari 2024

KEPALA



ELAFKI, S.Pd.MM

NIP.196911122000121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistimatiak Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Petrangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	22
2.4 Penelaahan usulan Program dan kegiatan masyarakat	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	32.
3.2 Tujuan dan Sararan Renja Perangkat Daerah	32
3.3 Program dan kegiatan	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB V PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah bersifat prediktif dan memuat hal-hal yang fundamental dan krusial yang terdiri dari Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 maka Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun.

RPJP Daerah Tahun 2006–2025 Kabupaten Solok ini merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Operasional RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, didalamnya memuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Renja merupakan pedoman perencanaan perangkat daerah untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan perangkat daerah secara rinci. Renja mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah yang merupakan breakdown dari Renstra perangkat daerah selama lima tahun. Keterkaitan kedua dokumen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan untuk menyusun program dan kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2025 mengacu pada Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKPN) dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 263 ayat (4) disebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Penyusunan dokumen Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2025 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2025 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 71);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Solok.

Penyusunan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah bagi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dalam melaksanakan kegiatan terhadap capaian program dan hasil kegiatan serta pagu anggaran dalam tahapan di tahun 2025 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2025 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan Satpol PP dan Damkar
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen RKPD Kabupaten Solok Tahun 2024 dengan dokumen Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2024.

1.4. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok yang dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis Laporan evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2023 dan Realisasi Triwulan I Tahun 2024 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok berupa :

1. Relisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
6. Kebijakan/tindakan rencana penggarangan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berikut rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 pada tabel T.C 29 sbb:

Tabel T.C 29
Rekapitulasi Eavaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok

Kode						Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcomes) Kegiatan Output	Target Kineja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Raelisasi Ca[aian Target Tenstra Perangkat Daetrah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Parngkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05					Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	Peningkatan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	12.143.221.840	11.818.171.753	12.143.221.840	11.818.171.753	97,32%	12.793.131.447	0	0
1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran	5.454.892.950	5.291.833.276	5.454.892.950	5.291.833.276	97,01%	9.819.516.585	0	0
1	05	01				Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.491.710	16.226.100	17.491.710	16.226.100	93%	14.099.040	0	0-
1	05	01	01			Penyusunan Dokumen perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.864.700	11.381.250	11.864.700	11.381.250	95,93%	14.099.040	0	0
1	05	01	06			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar Realisasi kinerja SKPD	Dokumen Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.627.010	4.844.850	5.627.010	4.844.850	86,61%	-	0	-
1	05	01	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	4.831.826.261	4.699.256.237	4.831.826.261	4.699.256.237	97,27%	8.837.634.631	0	

1	5	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	4.698.623.261	4.580.277.937	4.698.623.261	4.580.277.937	97,48%	4.918.022.407	0	
1	5	01	2	02	03	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	117.000.000	104.300.000	117.000.000	104.300.000	89,15%	3.915.808.224	0	
1	5	01	2	02	05	Koordinasi dan oenyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan SKPD	11.847.000	11.173.700	11.847.000	11.173.700	94,32%	-	0	
					07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulan/semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4.356.000	3.504.600	4.356.000	3.504.600	80,45%	3.804.000	0	
1	05	01	2			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlasananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	14.754.000	13.972.700	14.754.000	13.972.700	94,70%	48.747.534	0	0
1	05	01	2			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	6.650.000	6.650.000	6.650.000	6.650.000	100%	32.000.000	0	0
						Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		8.104.000	7.322.700	8.104.000	7.322.700	90,36%	16.747.534	0	0
1	05	01	2			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase telaksananya administrasi umum perangkat daerah	217.664.980	207.485.140	217.664.980	207.485.140	95,32%	397.812.900	0	
1	05	01	2			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	7.777.000	6.750.000	7.777.000	6.750.000	86,79%	-	0	0
1	05	01	2			Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	32.492.700	24.401.650	32.492.700	24.401.650	75,10%	42.627.000		0
1	05	01	2			Penyediaan Barang Cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengggandaan yangh disediakan	9.015.730	8.526.300	9.015.730	8.526.300	94,57%	10.613.000	0	0 -
1	05	01	2			Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	168.379.550	167.807.190	168.379.550	167.807.190	99,66%	344.572.900	0	0

1	05	01	2			Pengadaan Barang Milik daerah penunjang pemerintah daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	62.731.400	60.900.000	62.731.400	60.900.000	97,08%	24.840.000	0	0
1	05	01	2			Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor yang disediakan	62.731.400	60.900.000	62.731.400	60.900.000	97,08%	24.840.000	0	0
1	05	01	2			Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	33.103.887	24.337.151	33.103.887	24.337.151	73,52%	52.332.480	0	0
1	05	01	2			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1.560.000	1.551.000	1.560.000	1.551.000	99,42%	1.500.000	0	0
1	05	01	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	28.423.887	19.686.151	28.423.887	19.686.151	69,25%	49.032.480	0	0
1	05	01	2			penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediak	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100%	1.800.000	0	0
1	05	01	2			Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	279.660.712	269.055.948	279.660.712	269.055.948	96,21%	444.050.000	0	
1	05	01	2			Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapa	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan nya	263.210.000	259.653.899	263.210.000	259.653.899	98,65%	435.530.000	0	0
1	05	01	2			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	6.568.663	5.520.000	6.568.663	5.520.000	84%	-	-0	-
1	05	01	2			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	3.882.049	3.882.049	3.882.049	3.882.049	100%	8.520.000	0	0
1	05	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	3.760.369.556	3.772.139.444	3.760.369.556	3.772.139.444	98,98%	2.973.614.862	0	0

1	05	02	2	01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penertiban pelanggaran trantibum yang ditangani	3.474.830.346	3.439.461.884	3.474.830.346	3.439.461.884	98,98%	783.582.740	0	
1	05	02	2			Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan.	2.757.723.266	2.729.354.509	2.757.723.266	2.729.354.509	98,97%	281.890.000	0	0
1	05	02	2	01		Penindakan atas gangguan ketentraman ketertiban umum berdasarkan Perda dan Petkada melalui penertibandan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.	20.120.000	20.120.000	20.120.000	20.120.000	100%	-	0	0
1	05	02	2	02		Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota.	64.188.700	63.753.800	64.188.700	63.753.800	99,32%	92.050.960	0	0
1	05	02	2	03		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman danb ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil yang memuat Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.	88.905.460	87.837.000	88.905.460	87.837.000	99%	51.130.000	0	0
1	05	02	2	04		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	131.187.310	130.548.325	131.187.310	130.548.325	99,51%	23.975.000	0	0
1	05	02	2	05		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan Gangguan Ketentraman dan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kerjasama atar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan	140.677.500	140.384.300	140.677.500	140.384.300	99,80%	26.265.000	0	0

						ketertiban Umum	ketertiban umum								
1	05	02	2	01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana tranitubum	245.546.590	241.794.600	245.546.590	241.794.600	98%	55.839.780	0	0
1	05	02	2	01	08	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum yang tersedia	4.601.000	5.509.700	4.601.000	5.509.700	98%	15.000.000	0	0
1	05	02	2	01	09	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturann Daerah dan Perkada	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada yang tertangani	21.880.520	21.135.300	21.880.520	21.135.300	96,59%	-	0	0
1	05	04				PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2.927.959.334	2.804.259.123	2.927.959.334	2.804.259.123	95,78%	2.190.032.122	0	0
1	05	04	2	01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan dan evakuasi kebakaran	2.759.250.162	2.688.136.773	2.759.250.162	2.688.136.773	97,42%	2.158.923.122	0	0
1	05	04	2	01	01	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan pencegahan kebakaran	21.620.000	18.834.500	21.620.000	18.834.500	87,12%	-	0	0
1	05	04	2	01	02	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kesiapsiagaan petugas piket Pemadam Kebakaran	2.547.435.532	2.521.060.423	2.547.435.532	2.521.060.423	98,96%	172.328.200	0	0
1	05	04	2	01	03	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen piket hasil pelaksanaan evaluasi korban kebakaran dan Non kebakaran	32.986.280	27.828.000	32.986.280	27.828.000	84,36%	-	0	0
1	05	04	2	01	04	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penganan kebakaran yang disebabkan (B3) dalam daerah kabupaten/Kota	16.325.000	2.896.000	16.325.000	2.896.000	17,74%	-	0	0

1	05	04	2	01	05	Standarisasi sarana dan prasarana Pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	0	5.201.500	4.445.750	5.201.500	4.445.750	85,47%	-	0	0
1	05	04	2	01	06	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	0	76.014.030	65.207.100	76.014.030	65.207.100	85,78%	1.986.258.000	0	0
1	05	04	2	01	07	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	0	46.152.900	40.235.000	46.152.900	40.235.000	87,18%	-	0	0
1	05	04	2	01	09	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antardaerah berbatasan, atar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakarannya	0	13.514.920	7.630.000	13.514.920	7.630.000	56,46%	336.922	0	0
1	05	04	2	02		Inspeksi Peralatan dan proteksi kebakaran	Persentase terlaksananya Inspeksi Peralatan dan proteksi kebakaran	17.128.300	16.752.350	17.128.300	16.752.350	97,81%	-	0	0
1	05	04	2	02	01	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan /gedung yang memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran	8.268.500	8.041.350	8.268.500	8.041.350	97,25%	-	0	0
						Penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat data bangunan /gedung yang memenuhi kelaikan standar sarana dan prasarana kebakaran	8.859.800	8.711.000	8.859.800	8.711.000	98,32%	-	0	0
						Investigasi kejadian kebakaran	Persentase terlaksananya investigasi kejadian kebakaran	17.033.700	10.513.750	17.033.700	10.513.750	61,72%	-	0	0

						Investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Jumlah dokumen hasil Investigasi kejadian kebakaran meliputi Penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	17.033.700	10.513.750	17.033.700	10.513.750	61,72%	-	0	0
1	05	04	2	04		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	76.663.472	39.713.750	76.663.472	39.713.750	51,80%	31.109.000	0	0
1	05	04	2	04	01	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang yang mendapatkan sosialisasi edukasi Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	46.422.432	20.751.250	46.422.432	20.751.250	44,70%	16.990.000	0	0
1	05	04	2	04	02	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah nagari yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup system ketahapan kebakaran lingkungan/ SKKL setiap tahunannya	30.241.040	18.962.500	30.241.040	18.962.500	63%	14.119.000	0	0
1	05	04	2	04	03	Dukungan pemberdayaan masyarakat/ relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL desa/ keluhan yang telah tersedia dukungan sarpar damkar	0	0	0	0	0	0	0	0

Dari tabel diatas capaian kinerja program/kegiatan Satpol PP dan Damkar tahun 2023 sebagai berikut ;

1. capaian kinerja Program/kegiatan yang realisasinya sesuai rencana kerja dengan pagu anggaran sebesar Rp.12.143.221.840,- dengan capaian kinerja 97,32%, yang terurai dalam 3 Program , 13 kegiatan dan 32 Sub kegiatan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja sesuai dengan target kinerja dan pencapaian kinerja Rencana Trategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran tahun 2023 sebagai berikut:
 - Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan Damkar dengan melakukan Pembinaan, pelatihan dan pembinaan
 - Melakukan sosialisasi Perda Trantibum kepada masyarakat
 - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
 - Meningkatkan Patroli terhadap daerah daerah yang dianggap rawan gangguan trantibum.

Sesuai dengan hasil yang diperoleh dari pencapaian kinerja Rencana Srategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Solok tahun 2021-2026 maka secara umum berkinerja dengan baik.

3. Meskipun pencapaian kinerja Satpol PP dan Damkar sesuai dengan target namun masih ada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut :
 - Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai dengan jabatan dan beban tugas yang akan dikerjakan mengakibatkan lambatnya pelaksanaan kegiatan.
 - Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran
 - Masih kurangnya pelatihan dan pendidikan Dasar bagi aparaturn Satpol PP dan Damka
4. Kebijakan /tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut:
 - Perlu adanya Pendidikan dan Pelatihan untuk peningkatan mutu SDM.
 - Untuk sarana dan prasarana penunjang telah diusulkan melalui APBD pengadaan Sarana dan prasarana dimaksud.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 memiliki tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan Publik dan Meningkatkan Akuntabilitas dan kinerja Birokrasi

Sasaran dari tujuan tersebut terdiri atas :

1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
2. Meningkatnya Ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran
3. Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dan Pemadam Kebakaran.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah melaksanakan Tugas dan Fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2021-2026.

Berikut table kinerja utama dan formulasi Pengukuran beserta kriteria indikator kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2024 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi cara pengukuran	Sumber data	Keterangan
1.	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai	Nilai rata-rata unsur pelayanan	Satpol PP dan Damkar	Pengukuran IKM dilakukan melalui hasil survei 9 kriteria SKM oleh pihak internal
		Persentase penegakan Perda	%	$\frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran yang diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran}} \times 100\%$	Satpol PP dan Damkar	Penyelesaian Pelanggaran Perda melalui cara Penertiban dan Pembinaan serta Pembongkaran.
		Persentase Cakupan Petugas perlindungan Masyarakat	%	$\frac{\text{Jumlah Linmas yang ada}}{\text{Jumlah target Linmas}} \times 100\%$	Satpol PP dan Damkar	Kriterianya adalah jumlah linmas yang ada/aktif yang sesuai dengan surat

						keputusan Bupati
2.	Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan bencana kebakaran dalam Kabupaten/Kota	%	Jumlah Pos Pelayanan X 100% Jumlah penanganan kebakaran dalam WMK	Satpol PP dan Damkar	Kriterianya adalah Pos Pemadam yang ada sekarang
		Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	%	Jumlah layanan pemadam kebakaran dalam tingkat waktu Tanggap oleh pemadam kebakaran dan Relawan kebakaran Jumlah seluruh kejadian Kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Layanan pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Pemadam Kebakaran dan kelompok siaga kebakaran
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman ketertiban umum dan pem	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	Jumlah akuntabilitas SKPD	Nilai Kinerja Satpol PP dan Damkar	Pengukuran nilai akuntabilitas kinerja oleh Inpektorat Kab.Solok.
		Indeks Kepuasan Aparatur	Nilai	Nilai Indeks kepuasan Aparatur	Satpol PP dan Damkar	Pengukuran Nilai kepuasan aparatur oleh pihak internal Satpol PP dan Damkar

Pelaksanaan Program dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan pencapaian masing –masing indikator dalam rencana kerja tahunan dengan dana yang berasal dari APBD, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok salah satu organisasi Perangkat Daerah yang mendukung Urusan Wajib Pelayanan Dasar dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan Program dan kegiatan sebagai berikut:

I. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan dan Sub kegiatan :

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Dedeksi Dini, Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.
 2. Pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban umum.
 3. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Azazi manusia
 4. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertikban umum
 5. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
- II. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan:

1. Pencegahan, pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan.
 - Pencegahan kebakaran dalam Kabupaten/Kota
 - Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam kabupaten/kota
 - Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
 - Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota
 - Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
 - Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
 - Pembinaan aparatur pemadam kebakaran
 - Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah perbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

-

2. Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran
 - Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
 - Penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran
3. Investigasi kejadian kebakaran
 - Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Sub Kegiatan :

 - Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.
 - Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran.
5. Penyelenggaraan operasi pencarian pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia
 - Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan dan atau mengancam keselamatan manusia
 - Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi
 - Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi
 - Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi.

Berikut tabel Analisis pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP dan Damkar kabupaten Solok tahun 2023 pada Tabel T.C 30 sbb :

Tabel T.C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023 Satpol PP dan Damkar Kab.Solok

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n- 2)	(thn n- 1)	(thn n)	(thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		nilai	3,45	3,51	3,55	3,60	3,63	3,51	3,60	3,65	Penyelenggaraan pelayanan Trantibumlinmas dan pemadam kebakaran
2	Persentase Penegakan PERDA		%	100	100	100	100	100	100	100	100	Penyelenggaraan pelayanan gangguan trantibum dan indikasi pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti
3	Persentase Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		%	88,51	89,19	90,54	91,89	104	89.19	100	100	Jumlah seluruh Satlinmas nagari yang sudah dikukuhkan
4	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/ Kota		%	44,44	55,55	66,66	66,66	100	80	80	80	Cakupan pelayanan penanganan kebakaran dalam wilayah WMK (Wilayah Manajemen kebakaran)

5	Persentase Tingkat waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Pelayanan penanganan kebakaran yang terlaksana dalam waktu response time rate /Waktu tanggap
6	Nilai Akuntabilitas Kinerja	nilai	(BB) 78	(BB) 79	(A) 80	(A) 81	NA	NA	(A)80	(A)81	Nilai SAKIP tahun 2022 sedang dalam evaluasi, Th 2023 sedang berjalan
7	Indeks Kepuasan Aparatur	nilai	2,75	2,80	3,24	3,24	3,70	3,70	3,71	3,72	Kienerja pelayanan kesekretariatan Satpol PP dan Damkar kepada seluruh bidang.

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Satuan Satpol PP dan Damkar yang didasarkan Tugas dan Fungsi, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran perlu merumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Satpol PP dan Damkar antara lain :

1. Rendahnya rasio personil Satpol PP yang berkualitas PPNS dibandingkan jumlah penduduk.
2. Rendahnya cakupan Patroli Petugas Satpol PP sehingga meningkatnya Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah
3. Luas wilayah manajemen kebakaran yang berpotensi kebakaran tidak sebanding dengan pos pelayanan kebakaran yang ada.
4. Kurangnya Sosialisasi tentang layanan Informasi Kebakaran.
5. Kurangnya Sosialisasi tentang layanan Informasi Kebakaran.

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD dengan Hasil Analisa kebutuhan telah disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok. Berikut tabel T.C 3.1 Riview terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Solok

Nama Perangkat Daerah : Satpol PP dan Damkar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	Kab.Solok	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	100%	11.708.858.950	Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	Kab.Solok	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	100%	11.708.858.950	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satpol PP dan Damkar	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	10.512.475.322	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP dan Damkar	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	10.512.475.322	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	34.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	34.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	14.000.000	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	14.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar Realisasi kinerja SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	4 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar Realisasi kinerja SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	4 Dokumen	20.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Persentase terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	9.556.680.359	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Persentase terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	9.556.680.359	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP dan Damkar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	49 orang	4.918.022.407	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP dan Damkar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	49 orang	4.918.022.407	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ferivikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	4.624.053.952	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ferivikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	4.624.053.952	

	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	10.800.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	10.800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semester SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	12 Dokumen	3.804.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semester SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	12 Dokumen	3.804.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah	Satpol PP dan Damkar	Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah	100%	660.000	Administrasi Barang Milik Daerah	Satpol PP dan Damkar	Persentase terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah	100%	660.000	
	Penata usahaan Barang Milik Daerah	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya dokumen Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Dokumen	660.000	Penata usahaan Barang Milik Daerah	Satpol PP dan Damkar	Tersedianya dokumen Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Dokumen	660.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Persentase terlaksananya administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100%	31.747.534	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Persentase terlaksananya administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100%	31.747.534	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	52 Stel	15.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	52 Stel	15.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP dan Damkar	jumlah .Pegawai yang mengikuti pelatihan	15 orang	16.747.534	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP dan Damkar	jumlah .Pegawai yang mengikuti pelatihan	15 orang	16.747.534	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	362.962.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	362.962.900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah paket komponen Instalasi ListrikPenerangan bangunan kantor	4 paket	7.777.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah paket komponen Instalasi ListrikPenerangan bangunan kantor	4 paket	7.777.000	
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah paket bahan logistik kantor	37 paket	10.613.000	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah paket bahan logistik kantor	37 paket	10.613.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	24.840.000	Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	24.840.000	
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	344.572.900	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	344.572.900	

6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Satpol PP dan Damkar	Persentase terlaksananya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	24.840.000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Satpol PP dan Damkar	Persentase terlaksananya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	24.840.000	
	Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor yang disediakan	2 Unit Patroli	24.840.000	Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor yang disediakan	2 Unit Patroli	24.840.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Satpol PP dan Damkar	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	53.652.480	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Satpol PP dan Damkar	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	53.652.480	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP dan Damkar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP dan Damkar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Satpol PP dan Damkar	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 laporan	49.032.480	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Satpol PP dan Damkar	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 laporan	49.032.480	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	1.320.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	1.320.000	
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 laporan	1.800.000	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 laporan	1.800.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP dan Damkar	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	447.932.049	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP dan Damkar	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	447.932.049	
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah kendaraan dinas operasional yang di pemeliharaan, dan pajak yang dibayarkan	17 unit	435.530.000	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah kendaraan dinas operasional yang di pemeliharaan, dan pajak yang dibayarkan	17 unit	435.530.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	5 unit komputer, 6 unit laptop	8.520.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	5 unit komputer, 6 unit laptop	8.520.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit ruang area bebas Rokok	3.882.049	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit ruang area bebas Rokok	3.882.049	
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab.Solok	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	770.937.548	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab.Solok	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	770.937.548	

9	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Solok	Persentase terlaksananya Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	571.373.938	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Solok	Persentase terlaksananya Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	571.373.938	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab.Solok	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan.	12 kasus	15.100.099	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab.Solok	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan.	12 kasus	15.100.099	
	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.	Kab.Solok	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.	4 kasus	10.123.099	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.	Kab.Solok	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.	4 kasus	10.123.099	
	koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota.	Kab.Solok	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota.	4 Dokumen	92.050.960	koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota.	Kab.Solok	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota.	4 Dokumen	92.050.960	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan ketertiban Umum	Kab.Solok	Jumlah dokumen hasil yang memuat Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum.	1 dokumen	51.130.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan ketertiban Umum	Kab.Solok	Jumlah dokumen hasil yang memuat Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum.	1 dokumen	51.130.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	Kab.Solok	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	50 orang	23.975.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	Kab.Solok	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	50 orang	23.975.000	
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	Kab.Solok	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan	1 dokumen	26.265.000	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	Kab.Solok	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban	1 dokumen	26.265.000	1 dokume n

			ketentraman dan ketertiban umum					umum			
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan ketertiban Umum	Kab.Solok	Jumlah sarana dan prasarana trantibum	2 unit tenda semi pleton	55.839.780	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan ketertiban Umum	Kab.Solok	Jumlah sarana dan prasarana trantibum	2 unit tenda semi pleton	55.839.780	
	Penyusunan SOP Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kab.Solok	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban umum dan ketentraman mesyarakat yang telah dibuta dan dimutakhirkan	4 dokumen	15.000.000			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban umum dan ketentraman mesyarakat yang telah dibuta dan dimutakhirkan	4 dokumen	15.000.000	
	Penyediaan layanan dalam rangka dampak Penegakan peraturan Daerah dan Perkada	Kab.Solok	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada yang tertangani	1 laporan	15.100.099			Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada yang tertangani	1 laporan	15.100.099	
10	Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota	Kab.Solok	Persentase Pelaksanaan penegakan peraturan daerah kabupaten/kota	100%	148.863.610	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota	Kab.Solok	Persentase Pelaksanaan penegakan peraturan daerah kabupaten/kota	100%	148.863.610	
	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi perda	1 laporan	54.093.610	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi perda	1 laporan	54.093.610	
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali kota	Kab.Solok	Jumlah Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali kota	12 laporan	44.390.000	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali kota	Kab.Solok	Jumlah Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali kota	12 laporan	44.390.000	
	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati/Wali kota	Kab.Solok	Jumlah laporan penanganan atas pelanggaran Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati/Wali kota	12 laporan	50.380.000	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati/Wali kota	Kab.Solok	Jumlah laporan penanganan atas pelanggaran Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati/Wali kota	12 laporan	50.380.000	
11	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten kota	Kab.Solok	Persentase Pembinaan PPNS	100%	50.700.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten kota	Kab.Solok	Persentase Pembinaan PPNS	100%	50.700.000	
	Pengembangan kapasitas dan karir PPNS	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta penegakan Perda	1 laporan	50.700.000	Pengembangan kapasitas dan karir PPNS	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta penegakan Perda	1 laporan	50.700.000	

III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab.Solok	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	382.819.080	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kab.Solok	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	382.819.080	
12	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Solok	Persentase terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	274.299.680	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Solok	Persentase terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	274.299.680	
	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kab.Solok	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan pencegahan kebakaran	1 Dokumen	15.620.000	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kab.Solok	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan pencegahan kebakaran	1 Dokumen	15.620.000	
	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kesiapsiagaan petugas piket Pemadam Kebakaran	12 laporan	170.000.000	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kesiapsiagaan petugas piket Pemadam Kebakaran	12 laporan	170.000.000	
	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran	Kab.Solok	Jumlah dokumen Petugas Piket hasil pelaksanaan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	12 Dokumen	17.496.280	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran	Kab.Solok	Jumlah dokumen Petugas Piket hasil pelaksanaan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	12 Dokumen	17.496.280	
	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan (B3) dalam daerah kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.135.000	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan (B3) dalam daerah kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.135.000	
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab.Solok	Jumlah dokumen hasil Standarisasi Sarana prasarana Pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat Pelindung diri secara berkala (setiap tahun)	1 Dokumen	5.202.500	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab.Solok	Jumlah dokumen hasil Standarisasi Sarana prasarana Pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat Pelindung diri secara berkala (setiap tahun)	1 Dokumen	5.202.500	
	Pengadaan sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan alat Pelindung Diri	Kab.Solok	Jumlah sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan alat Pelindung Diri	3 paket	20.303.000	Pengadaan sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan alat Pelindung Diri	Kab.Solok	Jumlah sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan alat Pelindung Diri	3 paket	20.303.000	

	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab.Solok	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki Sertifikasi ketrampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1 orang	9.052.900	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab.Solok	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki Sertifikasi ketrampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1 orang	9.052.900	
	Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)	Kab.Solok	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa diperbarui atau di mutakhirkan secara berkala (setiap tahun) berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya	1 Nagari	4.390.000			Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa diperbarui atau di mutakhirkan secara berkala (setiap tahun) berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya	1 Nagari	4.390.000	
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Kab.Solok	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	1 dokumen	20.100.000	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Kab.Solok	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	1 dokumen	20.100.000	
	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Kab.Solok	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana Rumah Tangga	20 keluarga	5.000.000			Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana Rumah Tangga	20 keluarga	5.000.000	
13	Inspeksi Peralatan dan proteksi kebakaran	Kab.Solok	Persentase terdapatnya bangunan/gedung lingkungan yang memiliki sistem sarana prasarana proteksi kebakaran dan memenuhi kelaikan standar proteksi kebakaran	100%	17.127.500	Inspeksi Peralatan dan proteksi kebakaran	Kab.Solok	Persentase terdapatnya bangunan/gedung lingkungan yang memiliki sistem sarana prasarana proteksi kebakaran dan memenuhi kelaikan standar proteksi kebakaran	100%	17.127.500	
	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Kab.Solok	Jumlah Dokumen data bangunan/Gedung lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	1 Dokumen	8.268.500	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Kab.Solok	Jumlah Dokumen data bangunan/Gedung lingkungan yang dipersyaratkan harus memiliki sistem proteksi kebakaran	1 Dokumen	8.268.500	

	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Kab.Solok	Jumlah dokumen yang memuat data Bangunan/Gedung lingkungan yang memenuhi kelaikan Standar sarana prasarana proteksi kebakaran	1 Dokumen	8.859.000	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Kab.Solok	Jumlah dokumen yang memuat data Bangunan/Gedung lingkungan yang memenuhi kelaikan Standar sarana prasarana proteksi kebakaran	1 Dokumen	8.859.000	
14	Investigasi kejadian kebakaran	Kab.Solok	Persentase terlaksananya investigasi penyebab terjadinya kebakaran	100%	39.600.000	Unvestigasi kejadian kebakaran	Kab.Solok	Persentase terlaksananya investigasi penyebab terjadinya kebakaran	100%	17.033.700	
	Investigasi kejadian kebakaran meliputi Penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Kab.Solok	Jumlah dokumen hasil Investigasi kejadian kebakaran meliputi Penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	12 Dokumen	39.600.000	Investigasi kejadian kebakaran meliputi Penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Kab.Solok	Jumlah dokumen hasil Investigasi kejadian kebakaran meliputi Penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	12 Dokumen	17.033.700	
15	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Kab.Solok	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Pemadam kebakaran	100%	28.975.000	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Kab.Solok	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Pemadam kebakaran	100%	30.511.000	
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi Masyarakat	Kab.Solok	Jumlah warga masyarakat yang yang mendapatkan sosialisasi edukasi Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	200 orang	10.975.000	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi Masyarakat	Kab.Solok	Jumlah warga masyarakat yang yang mendapatkan sosialisasi edukasi Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	200 orang	10.760.000	
	Pembentukan dan Pembinaan relawan Pemadam Kebakaran	Kab.Solok	Jumlah Nagari yang terbentuk dan terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada lingkup sistim ketahanan kebakaran lingkungan /SKKL setiap tahunnya	4 Nagari	9.000.000	Pembentukan dan Pembinaan relawan Pemadam Kebakaran	Kab.Solok	Jumlah Nagari yang terbentuk dan terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada lingkup sistim ketahanan kebakaran lingkungan /SKKL setiap tahunnya	4 Nagari	13.181.000	
	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Kab.solok	Jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL Nagari yang telah tersedia dukungan sarpras Damkar	4 dokumen	9.000.000			Jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL Nagari yang telah tersedia dukungan sarpras Damkar	4 dokumen	6.570.000	
	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Kab.Solok	Persentase Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan manusia	100%	65.000.000	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan manusia	Kab.Solok	Persentase Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan manusia	100%	43.847.200	

	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan manusia	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan manusia	4 Laporan	20.000.000	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan manusia	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan manusia	4 Laporan	12.233.700	
	Standarinsasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan evakuasi.	Kab.Solok	Jumlah dokumen yang memuat kajian kebutuhan jenis sarana dan prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan evakuasi.yang sesuai standar secara berkala secara syah dn	1 Dokumen	5.360.000	Standarinsasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan evakuasi.	Kab.Solok	Jumlah dokumen yang memuat kajian kebutuhan jenis sarana dan prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan evakuasi.yang sesuai standar secara berkala secara syah dn	1 Dokumen	5.377.500	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Kab.Solok	Jumlah Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	4 Paket	24.640.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Kab.Solok	Jumlah Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	4 Paket	20.480.000	
	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi.	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	1 laporan	15.000.000	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi.	Kab.Solok	Jumlah laporan hasil Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	1 laporan	5.756.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok di buat berdasarkan penelaahan beberapa kajian sebagai berikut :

- Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
- Rencana pembangunan jangka Panjang Nasional
- Rencana pembangunan menengah nasional
- Rencana pencapaian standar pelayanan minimal
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok
- Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Solok
- Potensi dan permasalahan ketentraman. Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
- Monotoring dan evaluasi terkait ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- Musyawarah pembangunan tingkat di Tingkat kecamatan dan
- Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok.

Usulan Program dan kegiatan dari para Pemangku kepentingan Tahun anggaran 2025 terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak ada informasi dan usulan pada pelaksanaan Musrembang di Tingkat Kecamatan dan Musrembang di Tingkat Kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional

Telaah kebijakan Nasional untuk yang dilaksanakan di daerah mengacu pada arah kebijakan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang tertuang dalam rancangan awal RKPD yang memuat aspek-aspek peningkatan kualitas hidup sumberdaya manusia yang tercermin dalam kualitas peningkatan produktifitas tenaga kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Telaah terhadap kebijakan nasional juga menyangkut telaah kebijakan dan proiritas Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi tugas dan Fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok yang terintegrasi dalam sistim petencanaan pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Solok dan yang menjadi tanggung jawab Satpol PP dan Damkar sesuai dengan tugas dan fungsi dalam tujuan **meningkatkan kualitas pelayanan publik**.

B. sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan pemadam kebakaran.

C. Indikator kinerja tujuan dan sasaran

1. Persentase Penegakan Perda
2. Persentase cakupan Petugas Perlindungan masyarakat (linmas)
3. Persentase cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota
4. Persentase Tingkat waktu tanggap (Response time rate) dalam daerah layanan kebakaran
5. Indeks kepuasan aparatur.

3.3 Program dan kegiatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan, program dan kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah
Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas berserta atribut kelengkapannya.
4. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan
 - i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan dan Sub kegiatan :

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Dedtksi Dini, Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.
2. Penindakan atas gangguan Ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa
3. Pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban umum.
4. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Azazi manusia
5. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertikban umum
6. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

7. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
8. Penyediaan layanan dalam rangka Dampak penegerakan Peraturan Daerah dan Perkada.
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Sub Kegiatan :

1. Sosialisasi Penegagan peraturan Daerah dan peraturan Bupati /Walikota
2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
3. Kegiatan Pembinaan Penyidikan pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten /Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengembangan Kapasitas dan karir PPNS

III. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

1. Kegiatan Pencegahan, pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
4. Standarisasi sarana dan prasarana Pencegahan, Penaggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
5. Pengadaan Saran dan Prasarana pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
6. Pembinaan aparaturnya pemadam Kebakaran

7. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan Non kebakaran.

2. Kegiatan Inspeksi Peralatan dan Proteksi Kebakaran

Sub kegiatan :

1. Pendataan sarana dan prasarana Proteksi kebakaran
2. Penilaian sarana dan prasarana Proteksi kebakaran

3 . Kegiatan Investigasi kejadian kebakaran

Sub Kegiatan :

1. Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran

4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Sub Kegiatan :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui Sosialisasi dan edukasi masyarakat
2. Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran

5 . Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia
2. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/Penyelamatan dan evakuasi
3. Pengadaan sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/Penyelamatan dan evakuasi
4. Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/Penyelamatan dan evakuasi.

Berikut tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satpol PP dan Damkar Tahun 2025 dan Maju mundur tahun 2025 pada Tabel T.C 33 sbb :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Solok

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		100%	11.708.858.950				12.876.284.165
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	10.512.475.322				11.650.833.950
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	34.000.000	APBD		100%	42.175.000
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		4 Dokumen	14.000.000	APBD		4 Dokumen	7.175.000
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dolkumen laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD		4 Dokumen	20.000.000	APBD		4 Dokumen	35.000.000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi keuangan		100%	9.556.680.359	APBD		100%	7.823.658.950
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		49 orang	4.918.022.407	APBD		52 orang	7.546.408.950
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		12 Dokumen	4.624.053.952	APBD		12 Dokumen	197.250.000

1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 Dokumen	10.800.000	APBD		1 Dokumen	40.000.000
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD		12 Dokumen	3.804.000	APBD		14 Dokumen	40.000.000
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah		100%	660.000	APBD		100%	15.000.000
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Dokumen	660.000	APBD		2 Laporan	15.000.000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian perangkat Daerah yang terlaksana		100%	31.747.534	APBD		100%	850.000.000
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		52 Stel	15.000.000	APBD		52 Stel	150.000.000
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan		15 orang	16.747.534	APBD		6 orang	700.000.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	362.962.900	APBD		100%	600.000.000
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi ListrikPenerangan bangunan kantor yang disediakan		4 paket	7.777.000	APBD		4 paket	5.000.000
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		37 paket	10.613.000	APBD		37 paket	42.500.000
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan		2 paket	24.840.000	APBD		2 paket	20.643.000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 laporan	344.572.900	APBD		12 laporan	531.857.000

1.05.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		100%	24.840.000	APBD		100%	1.664.800.000
1.05.01.2.07.11	Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor yang disediakan		2 Unit Patroli	24.840.000	APBD		3 unit komuter	1.664.800.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa kebutuhan urusan administrasi kantor		100%	53.652.480	APBD		100%	85.000.000
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		1 laporan	1.500.000	APBD		1 laporan	2.000.000
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		1 laporan	49.032.480	APBD		1 laporan	30.434.000
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1 laporan	1.320.000	APBD		1 laporan	50.766.000
1.05.01.2.08.04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1 laporan	1.800.000	APBD		1 laporan	1.800.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang Milik Daerah		100%	447.932.049	APBD		100%	570.200.000
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinanya		17 unit	435.530.000	APBD		17 unit	283.900.000
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		5 unit komputer, 6 unit laptop	8.520.000	APBD		11 unit	10.000.000
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		1 unit ruang area bebas Rokok	3.882.049	APBD		1 unit	276.300.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penertiban pelanggaran trantibum yang ditangani		100%	100%	APBD		100%	758.959.152
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penertiban Pelanggaran GTrantibum		100%	571.373.938	APBD		100%	648.959.152

1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan.		12 kasus	15.100.099	APBD			341.959.152
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa yang dilakukan penindakan.		4 kasus	10.123.099	APBD			20.000.000
1.05.02.2.01.03	koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota.	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota.		4 Dokumen	92.050.960	APBD			30.000.000
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil yang memuat Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.		1 dokumen	51.130.000	APBD			57.000.000
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		50 orang	23.975.000	APBD			100.000.000
1.05.02.2.01.06	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan		1 dokumen	26.265.000	APBD			20.000.000
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia		2 unit tenda semi pleton	55.839.780	APBD		1 unit	50.000.000
1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat yang telah dibuat dan dimuthirkan		4 dokumen	15.000.000	APBD		4 Dokumen	10.000.000

1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada yang tertangani		1 laporan	15.100.099	APBD		1 Laporan	20.000.000
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota	Persentase pelanggaran Perda dan Perbup yang tertangani		100%	148.863.610	APBD		100%	90.000.000
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi Perda dan Perkada kepada Masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha.		1 laporan	54.093.610	APBD			53.000.000
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali kota		12 laporan	44.390.000	APBD			20.000.000
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati/Wali kota	Jumlah laporan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP.		12 laporan	50.380.000	APBD			17.000.000
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten kota	Persentase Pembinaan Personil PPNS		100%	50.700.000	APBD		100%	20.000.000
1.05.02.2.03.01	Pengembangan kapasitas dan karir PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada.		1 laporan	50.700.000	APBD			20.000.000
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100%	382.819.080	APBD			408.666.063
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan dan evakuasi kebakaran		100%	274.299.680	APBD		100%	251.190.508
1.05.04.2.01.01	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen NSPM penanggulangan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya		1 Dokumen	15.620.000	APBD			12.315.500

1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas Piket dan Pemadam kebakaran dalam daerah kabupaten /Kota		12 laporan	170.000.000	APBD			102.417.508
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan Petugas Piket dan penyalanatan evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran.		12 Dokumen	17.496.280	APBD			15.162.500
1.05.04.2.01.04	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan B3 dalam daerah kabupaten/kota		1 Dokumen	7.135.000	APBD			10.400.000
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan Standarisasi Sarana prasarana Pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat Pelindung diri secara berkala (setiap tahun) sah dan legal		1 Dokumen	5.202.500	APBD			6.750.000
1.05.04.2.01.06	Pengadaan sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran dan alat Pelindung Diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait.		3 paket	20.303.000	APBD			19.145.000
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki Sertifikasi ketrampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran		1 orang	9.052.900	APBD			20.000.000
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan sistim komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistim komunikasi dan informasi kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang bisa diperbaharui atau dimutakhirkan secara Berkala (setiap tahun) berkelanjutan dan Real Time yang dimiliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya.		1 Nagari	4.390.000				15.000.000
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan		1 dokumen	20.100.000	APBD			20.000.000

1.05.04.2.01.10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Jumlah kulurga yang mengikuti pelatihan Kuluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		20 keluarga	5.000.000				30.000.000
1.05.02.2.02	Inspeksi Peralatan dan proteksi kebakaran	Persentase Bangunan/Gedung / lingkungan yang memiliki sarpras Proteksi dan memenuhi stansar Proteksi kebakaran		100%	17.127.500	APBD		100%	21.800.000
1.05.02.2.02.01	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data Bangunan/Gedung yang memiliki sarana prasarana proteksi kebakaran		1 Dokumen	8.268.500	APBD			11.000.000
1.05.02.2.02.02	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data Bangunan/Gedung lingkungan yang memenuhi kelaikan Standar sarana prasarana proteksi kebakaran		1 Dokumen	8.859.000	APBD			11.800.000
1.05.02.2.03	Investigasi kejadian kebakaran	Persentase penyebab terjadinya kebakaran		100%	17.033.700	APBD		100%	39.700.000
1.05.02.2.03.01	Investigasi kejadian kebakaran meliputi Penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi Penelitian dan Pengujian		12 Dokumen	17.033.700	APBD			39.700.000
1.05.02.2.04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Nagari yang mengikuti sosialisasi dan edukasi pencegahan, peanggulangan kebakaran		100%	30.511.000	APBD		26 Nagari	29.975.555
1.05.02.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang yang mendapatkan sosialisasi edukasi Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran setiap tahunnya		200 orang	10.760.000	APBD			20.000.000
1.05.02.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Nagari yang terbentuk dan terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada lingkup sistim ketahanan kebakaran lingkungan /SKKL setiap tahunnya		4 Nagari	13.181.000	APBD			5.360.000
1.05.02.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Jumlah dokumen yang memuat jumlah SKKL Desa/kelurahan ysang telah tersedia Dukungan Sarpras Damkar		4 dokumen	6.570.000				24.640.000

1.05.02.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kondisi membahayakan manusia		100%	43.847.200	APBD		100%	66.000.000
1.05.02.2.05.01	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia		4 Laporan	12.233.700	APBD			28.000.000
1.05.02.2.05.02	Standarinsasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan evakuasi.	Jumlah dokumen yang memuat kajian kebutuhan jenis sarana dan prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan evakuasi.yang sesuai standar		1 Dokumen	5.377.500	APBD			5.360.000
1.05.02.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi yang sesuai Standar Teknis		4 Paket	20.480.000	APBD			24.640.000
1.05.02.2.05.04	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi.	Jumlah laporan hasil Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang sah dan legal		1 laporan	5.756.000	APBD			16.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2025

Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran dilaksanakan melalui proses perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja melalui kebijakan-kebijakan dan mengacu pada visi dan misi yang diemban oleh Satpol PP dan Damkar yang tertuang dalam Renstra. Adapun rencana kerja Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, target capaian dan pendanaan /pagu indikatif tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Satpol PP dan Damkar Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,60	Rp 571.373.938
2	Persentase Penegakan Perda	100	Rp 770.937.548
3	Persentase Cakupan Petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)	91.89	Rp 75.105.000
4	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ kota	66,66%	Rp 308.460.880
5	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) xaerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100%	Rp 10.760.000
6	Nilai Akuntabilitas kinerja	81 (A)	Rp 20.000.000
7	Indeks Kepuasan Aparatur	3,34	Rp 9.952.221.584
	Jumlah		Rp 11.708.858.950

BAB V

PENUTUP

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2025. disusun berdasarkan pada Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dan hasil pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2021, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kabupaten Solok yaitu *“Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat”* dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Solok dengan lebih efektif dan efisien.

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok tahun 2024.

Arosuka, Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SOLOK



ELAFKL S.Pd. MM
NIP. 196816021990091002

RENCANA KERJA TAHUNAN
Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok
TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	3,60
		Persentase Penegakan PERDA	100
		Persentase Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat(Linmas)	91,89
2	Meningkatnya Ketahanan Masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota	66,66
		Persentase Tingkat waktu tanggap (<i>Response time rate</i>) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100
3	Meningkatnya kualitas Pelayanan ketentraman ketertiban umum dan pemadam kebakaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja	(A) 81
		Indeks Kepuasan Aparatur	3,34

Arosuka, Januari 2024
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
 PRALA KABUPATEN SOLOK



ELAFKL S.Pd. MM
 NIP. 196816021990091002